

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS
PERHUBUNGAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI
JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG
ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

ADRYAN PRATAMA NST
NPM : 1703100069

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kosentrasi Administrasi Pembangunan



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **ADRYAN PRATAMA NST**
NPM : 1703100069
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 07 September 2022
Waktu : 08.15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

(.....)

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos., MH**

(.....)

PENGUJI III : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.**

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **ADRYAN PRATAMA NST**
NPM : 1703100069
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Dalam Angkutan Umum Di Kota Medan

Medan, 07 September 2021

PEMBIMBING



AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Adryan Pratama Nst NPM **1703100069** menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 8 September 2022



Yang menyatakan,

Adryan Pratama Nst

ADRYAN PRATAMA NST
NPM : 1703100069

ABSTRAK

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa transportasi yaitu dengan penyediaan pelayanan angkutan kota. Dalam mewujudkan Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan, dimana pelayanan angkutan kota yang baik terhadap masyarakat, strategi merupakan hal yang sangat penting. Demikian pula Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki strategi dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota di Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan strategi dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori meningkatkan kinerja pelayanan publik David Osborne yang mempunyai 5 indikator yaitu; strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengawasan, dan strategi budaya.

Strategi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan “Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan. Pelayanan angkutan kota di Kota Medan adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 dan Nomor PM 29 Tahun 2015. Strategi Dinas Perhubungan secara umum belum berjalan dengan baik, karena kondisi dilapangan tidak mendukung untuk terlaksananya strategi yang dijalankan. Hal ini terkait dengan strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengawasan, dan strategi budaya.

Kata Kunci : *Efektivitas Pengawasan dan Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal 'alaamiin atas kehadiran Allah Subhanawala'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul : **"Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan "**.

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalumemberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikanya tepat waktu.
2. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Ichsan Nasution dan Ibunda Tercinta Regina Masri Dalimunthe yang telah banyak meberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas MuhammadiyahSumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Ananda Jehan Ridho ,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan IlmuAdministrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Affan Al Quddus,S.Sos.,M.Si. selaku pembimbing saya yang telahbanyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skiripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan terima kasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti Dan tak lupa kepada my support sistem (wingga daulay) yang telah memeberikan support dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dandukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupajuga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang adaselama penulisan skripsi ini.

Medan, 21 Mei 2022

Penulis

ADRYAN PRATAMA NST

NPM : 1703100069

DAFTAR ISI

SURATPERNYATAAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR GAMBAR.....viii

DAFTARLAMPIRAN.....ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah1

1.2 RumusanMasalah...4

1.3 TujuanPenelitian.....5

1.4 Manfaat Penelitian.....5

1.5 Sistematika Penulisan.....

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Konsep Efektifitas.....7

2.2. Kriteria Pengukuran Efektivitas.....8

2.3. Jenis-jenis Efektivitas..... 10

2.4. Pengawasan Internal.....10

2.5. Optimalisasi.....11

2.6. Penumpang..... 12

2.7.	Angkutan Umum.....	14
------	--------------------	----

BAB IIIMETODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	16
3.2	Kerangka Konsep.....	17
3.3	Definisi Konsep.....	17
3.4	Kategorisasi.....	18
3.5	Informan atau Narasumber.....	19
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.7	Teknik Analisis Data.....	20
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	21
3.9.1.	Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan.....	21
3.9.2.	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	21
1.9.3.	Deksripsi Jabatan.....	22

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Penyajian Data.....	42
4.2.	Deskripsi Hasil Wawancara.....	42
4.2.1.	Adanya efektivitas program yang diatur.....	43
4.2.2.	Adanya pengawasan yang dilakukan.....	46
4.2.3.	Adanya tujuan yang ingin dicapai.....	49
4.3.	Pembahasan.....	53

4.3.1. Adanya efektivitas program yang diatur.....	53
4.3.2. Adanya pengawasan yang dilakukan.....	57
4.3.3. Adanya tujuan yang ingin dicapai.....	58

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	17
Gambar 3.2 Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pernyataan
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi
dan Pembimbing
- Lampiran V : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran VI : Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian Mahasiswa
- Lampiran VII : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran VIII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran IX : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran X : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran XI : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran XIII : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PEMDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem manajemen Keselamatan Penumpang merupakan pilar pertama rencana umum Nasional atau (RUNK) yang dalam pelaksanaannya perpedoman dalam Peraturan Menteri (PM 85 tahun 2018). Tentang Sistem Manajemen Keselamatan perusahaan angkutan umum. Dalam semiloka yang bertema Peningkatan Keselamatan pada Angkutan orang dan Angkutan barang di Kota Medan. Satu hal yang disampaikan adalah mengenai system manajemen keselamatan penumpang ini menjadi bagian dari manajemen perusahaan berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi untuk mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.

Dengan memegang peranan penting dalam dinamika masyarakat bahkan dinamika negara dan bangsa, baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan budaya, kehidupan politik, terutama dalam bidang kehidupan sosial ekonomi, transportasi mempunyai ungkapan “*ship follow the and trade follow the ship*” Kata *ship follow the trade* mengandung makna bahwa transportasi mengikuti perkembangan maupun kemajuan aktifitas perdagangan masyarakat. Dan kata *trade follow the ship* berarti bahwa perkembangan kegiatan perdagangan suatu masyarakat tergantung pada transportasi. Dengan begitu dapat diartikan bahwa perkembangan suatu daerah atau masyarakat/wilayah tergantung dari perkembangan transportasi,

atau sebaliknya, perkembangan transportasi suatu negara dan masyarakat tergantung pada perkembangan aktivitas atau kegiatan perdagangan, bisnis dari suatu negara atau masyarakat/wilayah tersebut (*Simbolon,2003:4*).

Kemajuan dalam bidang transportasi terus dipusatkan dikarenakan sukarnya mencapai suatu tempat karena jarak atau hal lainnya, maka hal-hal seperti keselamatan dan kenyamanan sangat perlu dikembangkan kondisinya pada sistem transportasi. Sistem transportasi yang paling dominan adalah sarana dan prasarana yang selalu berkaitan dengan faktor teknis terutama keselamatan bagi pengguna jasa transportasi, agar tidak menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat.

Keseimbangan antara kebutuhan jasa transportasi dan tersedianya prasarana dan sarana transportasi merupakan keharusan untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan transportasi yang efektif dan efisien. Sistem transportasi yang bertambah lancar dan berkapasitas juga akan memunculkan masalah dalam keamanan dan keselamatan pengguna transportasi. Untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi perlu dilakukan pemeriksaan berkala kondisi transportasi.

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan juga dikenal dengan kota termacet ke-6 di Indonesia, dimana volume kendaraan mengalahkan jumlah penduduk. Situs Republika mencatat jumlah penduduk

Kota Medan sekitar 2,5 juta, sementara jumlah sepeda motor mencapai 2,8 juta unit.

Sedangkan rasio jumlah transportasi pribadi dengan transportasi umum 97,8 persen berbanding 2,2 persen. Artinya, transportasi menyeksi jalan umum (www.kompasiana.com). Terhitung dari tahun 2018 sampai 2020 banyaknya kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara khususnya kota Medan sebanyak 1.865.300 kasus (*sumber. polda Sumatera Utara Direktorat lalu lintas*).

Dalam kasus diatas dinas perhubungan kota Medan bertanggung jawab penuh atas memberikan pemahaman agar masyarakat memiliki kesadaran sebagai pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian layak jalan kendaraan atau izin trayek tetapi tetap beroperasi. Selain berdampak pada pembawa kendaraan ataupun penumpang kendaraan, karena tidak tertutup kemungkinan bagian-bagian penting yang harus di uji tidak lagi bekerja dengan semestinya hal ini juga akan mengurangi pendapatan bagian KIR di Dinas Perhubungan Kota Medan. Diantara kendaraan yang melakukan pengujian layak jalan atau izin trayek Dinas Perhubungan Kota Medan adalah mini bis, pick up, truk, dan mobil penumpang yang dilakukan dalam waktu satu kali dalam enam bulan. Kegiatan pengujian kendaraan ini dilakukan pada titik penting kendaraan seperti bagian rem, lampu-lampu, bola stir dan ban. Pengujian ini dilakukan agar terciptanya keselamatan pada pembawa serta penumpang kendaraan. Tetapi masih banyak para pemilik kendaraan yang belum sadar akan keselamatan dalam berkendara, artinya

mereka tidak melakukan pengujian layak jalan kendaraan atau izin trayek dengan efektif seperti halnya dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam mendukung terciptanya keselamatan, pemerintah Mengeluarkan peraturan Nomor 37 tahun 2007 tentang Keseleamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2005, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6122).

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul : **“Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan ?.

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan”.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN :

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS :

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Pembinaan, Pengertian Pengelola, Pengertian Perparkiran.

BAB III: METODE PENELITIAN :

Dalam bab ini yang akan diuraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informasi Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data Dan Lokasi Waktu Penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian dilapangan dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V :PENUTUP :

Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEPROTIS

2.1. Pengertian Konsep Efektifitas

Menurut Siagia bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektifitasnya (2002:24).

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2009: 59).

Sumaryadi mengatakan bahwa efektifitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai (2005:105).

Gie mengatakan bahwa efektifitas bermanfaat dalam memberikan pelayanan pada orang lain atau kepada organisasi yang

menggunakan produknya seperti halnya dengan organisasi yang bersangkutan(2000:260).

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut (Supriyono, 2000: 29).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, efektivitas adalah tindakan-tindakan yang dilakukan suatu organisasi/intansi untuk melaksanakan atau menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga tercapainya program-program yang telah di sepakati.

2.2. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan antara lain:

- a. Faktor waktu Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau

cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas kerja.

- b. Faktor kecermatan Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat.
- c. Faktor gaya pemberian pelayanan Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja si pelanggan merasa tidak sesuai dengan gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jika berbicara tentang sesuatu hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa yang dibicarakan termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh orang yang bersangkutan.

2.3. Jenis-jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) dalam Evi Suryani (2016) antara lain :

- a. Efektivitas Individu Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
- b. Efektivitas kelompok Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.
- c. Efektivitas organisasi Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap –tiap bagiannya.

2.4. Pengawasan Internal

Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan perusahaan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Menurut Niswonger, “Pengawasan internal (Internal Control) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundangundangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya” (1999: 183).

Menurut Mulyadi (2001: 163), menyatakan bahwa : Pengawasan internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dalam suatu intansi adalah penting untuk menghindari kesalahankesalahan dan kecurangan informasi internal yang menyebabkan kerugian bagi pihak intansi.

2.5. Optimalisasi

Optimalisasi menurut WJS.Poerwadarminta dalam Istilah Laili (2002:8) berasal dari kata optimum yang berarti terbaik, paling menguntungkan,. Dalam hal ini, optimalisasi membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi, sedangkan optimum adalah tingkatan yang sangat menguntungkan dalam batas-batas tertentu dan pengoptimalan merupakan penyempurnaan suatu sistem agar berprestasi sebaik-baiknya atas dasar kriteria-kriteria tertentu (2002:8).

Sedangkan menurut Gibson Optimalisasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan diantara kriteria, kreativitas atau dengan kata lain upaya untuk meningkatkan sumber-sumber yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan yang di harapkan (1984 : 701).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Optimalisasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan yang diharapkan agar menjadi lebih meningkat lagi.

2.6. Penumpang

Penumpang bisa dikatakan sebagai users yaitu pemakai jasa angkutan bus, taksi dan lain- lain. Penumpang adalah orang yg menumpang atau orang yg naik (kereta, kapal, bus dsb). (<http://www.artikata.com/arti-382537-penumpang.html>).

Dalam penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi kepada penumpang, terdapat penggolongan penumpang yaitu penumpang biasa dan penumpang aktif bisa disebut juga pelanggan. Pelanggan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruh pada performa kita atau perusahaan manajemen. Maine dkk (dalam Nasution, 2004:101) memberikan beberapa definisi tentang pelanggan yaitu:

- a. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung padanya.

- b. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada apa keinginannya.
- c. Tidak ada seorangpun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan.
- d. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dihapuskan.

Disamping itu pelanggan masih dapat digolongkan lagi. Nasution (2004:102) mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis golongan pelanggan dalam system kualitas modern, yaitu:

1) Pelanggan Internal

Adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performansi pekerjaan (atau perusahaan) kita.

2) Pelanggan Antara

Adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk.

3) Pelanggan Eksternal

Adalah pembeli atau pemakai akhir produk, yang sering disebut dengan pelanggan nyata. Pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar untuk menggunakan produk yang dihasilkan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penumpang adalah pengguna jasa transportasi angkutan jalan darat untuk mobilisasi. Penumpang termasuk kriteria pelanggan eksternal karena menggunakan produk /jasa terakhir sehingga disebut pelanggan nyata.

2.7. Angkutan Umum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan pada Bab 1 ketentuan Umum mendefinisikan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya. PP No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan pada Bab 1 Ketentuan Umum mendefinisikan:

1. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
2. Mobil penumpang umum (MPU) adalah mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum.

Kendaraan umum dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang, dan bus besar. Mobil penumpang yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum disebut mobil penumpang umum. Sistem angkutan penumpang dapat dikelompokkan menurut penggunaan dan cara pengoperasiannya, yaitu:

1. Angkutan pribadi, yaitu angkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh dan untuk keperluan pribadi pemilik.
2. Angkutan umum, yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu.

Terdapat 2 (dua) sistem pemakaian angkutan umum yaitu:

1. Sistem sewa: kendaraan bisa dioperasikan oleh operator maupun penyewa, dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal tertentu yang harus diikuti oleh pemakai, sistem ini sering disebut sebagai “demand responsive system” karena penggunaannya yang tergantung dengan adanya permintaan.
2. Sistem penggunaan bersama: kendaraan dipersiapkan oleh operator dengan rute dan jadwal yang biasanya tetap.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya dan memiliki ketentuan sesuai pengguna dan cara pengoperasian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Menurut Moleong (2014:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain (2014:11).

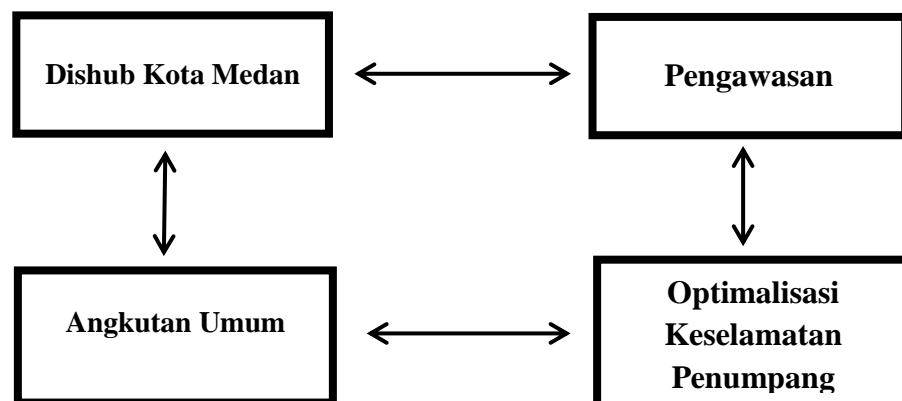
Menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel lain (2016:11).

3.2. Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Kerangka konsep



3.3. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka

Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum

Di Kota Medan, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Efektivitas adalah tingkatan-tingkatan seseorang atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang mana terget (kualitas, kuantitas dan waktu) harus di selesaikan dengan memanajemnya terlebih dahulu.
- b. Pengawasan internal dalam suatu intansi adalah penting untuk menghindari kesalahankesalahan dan kecurangan informasi internal yang menyebabkan kerugian bagi pihak intansi.
- c. Optimalisasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan yang diharapkan agar menjadi lebih meningkat lagi.
- d. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya dan memiliki ketentuan sesuai pengguna dan cara pengoperasian.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Adanya efektivitas program yang diatur.
- 2) Adanya pengawasan yang dilakukan.
- 3) Adanya tujuan yang ingin dicapai.

3.5. Informan dan Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1) Bidang perencanaan dan evaluasi,

Nama : Ihsan

Usia : 38 tahun

Jenis kelamin : laki-laki

Jabatan : Staff bidang dan perencanaan evaluasi

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian

dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Bogden teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2016:140).

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.

1.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris Lalang Kec. Medan Sunggal, Sumatera Utara. Dan akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2022.

1.9. Deskripsi ringkas Objek Penelitian

9.1.1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada dibawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

9.1.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Adapun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut :

Visi Dinas Perhubungan Kota Medan

“Terciptanya transportasi Kota Medan yang handal, nyaman dan manusiawi”.

Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat
- b. Mewujudkan sistem angkutan massal terpadu.
- c. Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi.
- e. Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah.

9.1.3. Deskripsi Jabatan

1. Kepala Dinas

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan atas otonomi dan pembantuan.

b. Tugas dan Kegiatan

- Perumusan Kebijakan Teknis dibidang perhubungan
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

a. Ikhtisar Jabatan

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dilingkungan SKPD.

b. Tugas dan kegiatan

- Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program SKPD
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaiann dan Kerumahtanggaan SKPD. Pengelola dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketalaksanaan yaitu merumuskan rencana pengembangan sumber daya aparatur, kelembagaan dan ketalaksanaan serta meneruskannya kepada atasan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.

3. Kepala Sub Bagian Umum

a. Ikhtisar Jabatan

Kepada Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan dan mneyenggarakan sebagian tugas Sekretariat yaitu dibidang administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian dalam rangka mendukung tugas-tugas SKPD.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum.
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan SKPD
- Administrasi kepegawaian
- Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan sebagian tugas sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas- tugas SKPD.

5. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat

a. Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas lingkup teknik perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian bermotor dan pengembangan teknik terminal.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyusunan rencanam program dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, pengembangan teknik terminal
- Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup bengkel umum kendaraan bermotor, usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi
- Pengkoordinasian kegiatan dibidang pelayanan dan pengembangan terminal
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat
- Penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tuga dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri

a. Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan pelayanan proses pemberian surat izin gangguan bukan industry lingkup teknik perbengkelan karoseri

dan kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan tugas-tugas bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.

b. Tugas dan kegiatan

- Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi teknik perbengkelan karoseri
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup teknik perbengkelan karoseri
- Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup teknik perbengkelan karoseri
- Menyelenggarakan proses pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota
- Penyiapan bahan dan data pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan perbengkelan
- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Staff Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri

a. Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan tugas administrasi, pelayanan pemberian surat izin gangguan bukan industry dan kegiatan lain

yang mendukung pelaksanaan tugas seksi teknik perbengkelan karoseri.

b. Tugas dan Kegiatan

- Melaksanakan tugas administrasi
- Memproses pemberian suat izin gangguan bukan industry lingkup teknik perbengkelan karoseri

8. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas pokok mengerjakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengembangan teknik pegujian kendaraan bermotor

b. Tugas dan Kegiatan

- Menyusun Program seksi Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan
- Melakukan pembinaan kepada seluruh staff menyusun program seksi Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan
- Berkoordinasi dengan para Kepala UPT Pengujian terhadap peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Medan
- Melaksanan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- Berkoordinasi dengan instansi lain

9. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Terminal

a. Ikhtisar Jabatan

Seksi pengembangan teknik terminal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat Lingkup Pengembangan Teknik Terminal.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyiapan rencanam program yang kegiatan bidang teknis sarana dan prasarana angkutan darat
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, pengembangan teknik terminal
- Melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang pelayanan, pengembangan pengelolaan terminal yang bukan Unit Pelaksanaan Teknik (UPT) dinas dalam hal ini 2 (dua) terminal yaitu terminal penumpang sambu dan terminal penumpang belawan.
- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang lalu lintas dan angkutan darat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyusunan rencana kerja angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban
- Pelaksanaan proses dan pelayanan perizinan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban
- Pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja, pelayanan serta pengawasan dan pengendalian dibidang angkutan darat
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok pada seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Penyusunan, pengolahan data lingkup Manajemen dan Rekayasa Llau lintas
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan dibidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan Pemerintah Kota
- Penyiapan bahan dan data penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota, penetapan kelas jalan pada jaringan jalan, penepatan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sesuai tugas dan fungsinya.

12. Kepala Seksi Angkutan Darat

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok pada seksi seksi angkutan darat

b. Tugas dan Kegiatan

- Melakukan pembinaan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraa Angkutan Umum
- Melakukan pembinaan terhadap angkutan orang dan/atau barang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

13. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas penyiap rencana, porgram, menyusun bahan petunjuk teknis, mengumpul, mengelola data lingkup pengendalian dan ketertiban dan penyiapan bahan data proses perizinan penggunaan jalan serta monitoring dan evaluasi.

b. Tugas dan Kegiatan

- Mempersiapkan rencana, program kegiatan rutin dalam hal ini memantau situasi lalu lintas
- Mempersiapkan bahan-bahan petunjuk teknis yang akan diterapkan di lapangan dalam lingkup pengendalian dan ketertiban
- Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan masukan untuk kajian kinerja seksi pengendalian dan ketertiban
- Memberi pelayanan melalui izin yang diberikan untuk

menggunakan jalan diluar kepentingan lalu lintas

- Memberi pembinaan, pengawasan bagi para pemegang izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
- Membuat bahan evaluasi dan monitoring hasil kerja di lapangan
- Menerima dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

14. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kota medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas, angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran, dilingkungan Pemerintah Kota Medan.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perhubungan Laut dan Udara
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup kepelabuhan dan kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran
- Pelaksanaan proses perizinan, rekomendasi dan pelayaran lainnya lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut, dan penunjang keselamatan pelayaran meliputi surat izin berlayar (SIB), izin kegiatan pengerukan kegiatan

reklamasi, izin kegiatan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan khusus local, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha perusahaan angkutan laut dan lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota.

- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut, dan penunjang keselamatan pelayaran.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang perhubungan laut dan udara
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

15. Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian lingkup kepelabuhan dan kebandarudaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

b. Tugas dan kegiatan

- Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan
- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Kepelabuhan dan Kebandarudaraan
- Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup

Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan meliputi izin kegiatan pengerukan, izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus local dan lainnya sesuai dengan urusan Pemerintah Kota

- Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan
- Penyiapan bahan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

16. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok bidang perhubungan laut dan udara lingkup lalu lintas dan angkutan laut.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi lalu lintas dan angkutan laut
- Pelaksanaan bahan petunjuk teknis lingkup lalu lintas dan angkutan laut
- Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup lalu lintas dan angkutan laut meliputi izin usaha perusahaan

angkutan laut, izin usaha pelayanan rakyat, izin usaha ekspedisi dan lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota

- Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup lalu lintas dan angkutan laut
- Penyiapan bahan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

17. Kepala Seksi Penunjang Pelayaran

a. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan sebagian tugas bidang Perhubungan Laut

b. Tugas dan Fungsi

- Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penunjang keselamatan pelayaran
- Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup penunjang keselamatan pelayaran
- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

18. Kepala Bidang Perparkiran

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup parkir khusus dan parkir harian.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyusunan rencana kerja dibidang perparkiran
- Pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan perparkiran di Kota Medan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi parker untuk pelaksanaan target PAD Kota Medan
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tugas SKPD
- Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan di bidang perparkiran Kota Medan

19. Kepala Seksi Parkir Khusus

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kota Medan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perparkiran Lingkup Parkir Khusus

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir khusus
- Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir khusus

- Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran Khusus dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di tempat-tempat khusus
- Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tempat-tempat khusus
- Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup parkir khusus
- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan

20. Kepala Seksi Perkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I)

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) Bidang Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kota Medan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perparkiran.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir tepi jalan
- Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir tepi jalan wilayah I
- Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum Wilayah I

- Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah I)
- Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran
- Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan

21. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II)

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran.

b. Tugas dan Kegiatan

- Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir tepi jalan
- Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir tepi jalan Wilayah II
- Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran dan pemberia izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah II)
- Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan
- Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan,

pengawasan, pengendalian perparkiran

- Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan

22. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan Terminal Penumpang

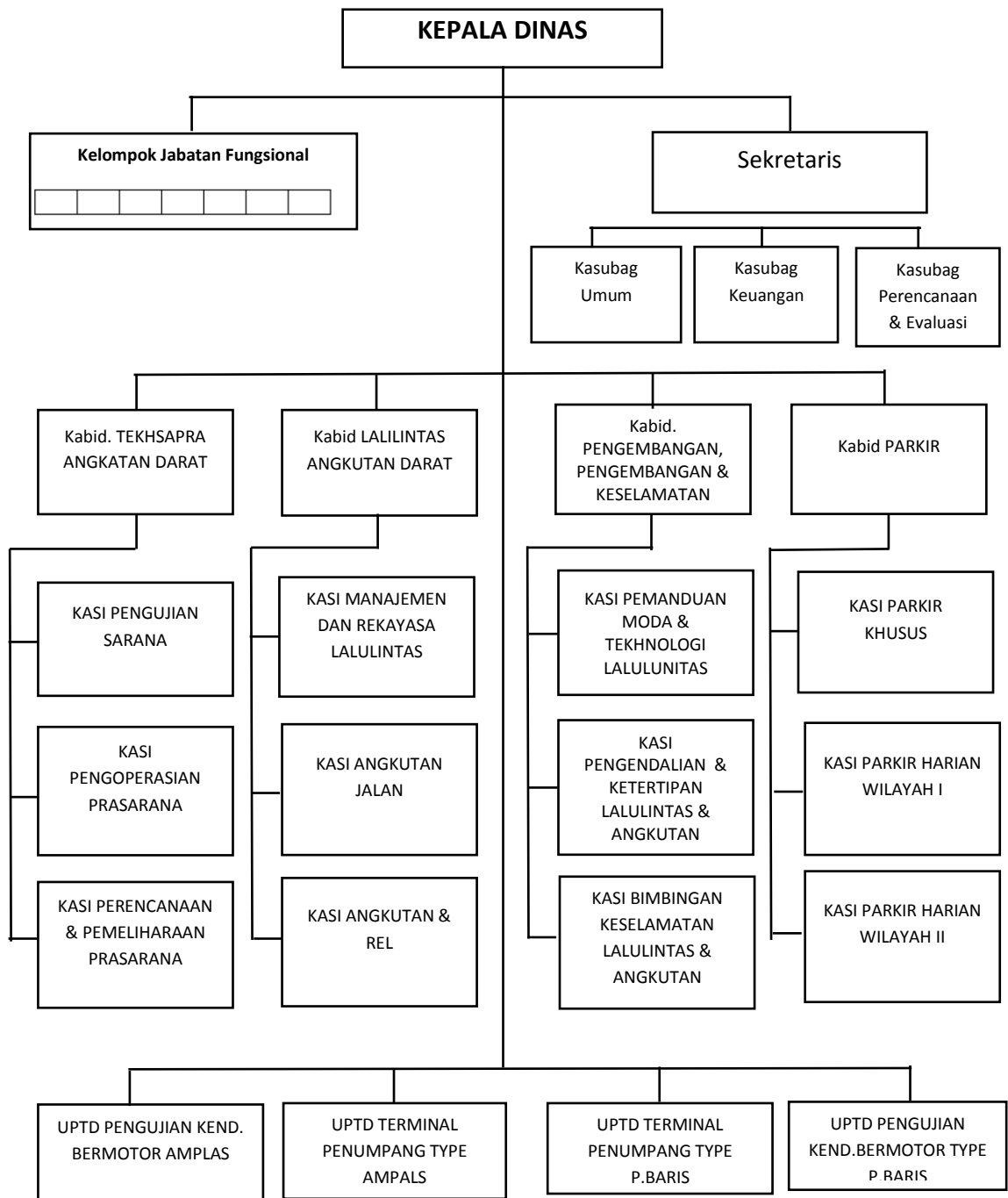
b. Tugas dan Kegiatan

- Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas/pekerjaan yang diberikan Kepala Dinas baik melalui perintah lisan maupun secara tertulis dan melaporkannya kemabli kepada Kepala Dinas
- Bertanggung jawab terhadap seluruh aset Pemerintah Kota Medan yag ada di UPT Terminal serta perawatannya
- Menyusun dan melaporkan program yang akan dilaksanakan di UPT Terminal
- Menyusun dan melaporkan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum lainnya baik berupa laporan harian maupun bulanan baik kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana,

Kepala Kepala Tata Usaha dan Kepada Bendahara Penerima
Dinas Perhubungan

- Bertanggungjawab terhadap seluruh staff dan kegiatan yang ada di UPT terminal
- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan angkutan baik Angkutan Kota, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP)
- Bertanggungjawab serta melaporkan setiap hari atas seluruh pengutan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di UPT Terminal.

Gambar 3.2
BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



Sumber : Dinas Perhubungan Kota

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi data ini berfokus pada kantor Dinas Perhubungan Kota Medan dan masyarakat umum atau penumpang Angkutan Umum di Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini ada 5 (lima) orang dari pihak Dinas perhubungan dan masyarakat umum.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

4.2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan”.

Tabel 4.1
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-Laki	2
2	Perempuan	1
	Jumlah	6

Sumber. Hasil Penelitian 2022 Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang diwawancarai pada penelitian ini ketiga memiliki pendidikan S-1 (Strata 1).

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Nama	Pendidikan	Jumlah
1	Ihsan	S1	1
2	Fahrizki	S1	1
3	Tia	S1	1
	Jumlah		3

Sumber: Hasil Penelitian 2021 Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang diwawancarai pada penelitian ini ketiganya memiliki pendidikan S1 (Strata 1).

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Nama	Usia	Jumlah
	Ihsan	38	1
2	Fahrizki	36	1
3	Tia	29	1
	Jumlah		3

Sumber: Hasil Penelitian 2021 Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang diwawancarai yaitu Bapak Ihsan berusia 38 tahun, Bapak Fahrizki berusia 35 tahun, dan Ibu Tika berusia 29 Tahun.

Tabel 4.4
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Ihsan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan	1
2	Fahrizki	Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan	1
3	Tika	Karyawan swasta	1
	Jumlah		3

Sumber: Hasil Penelitian 2021 Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, dimana narasumber yang diwawancarai 2 orang laki-laki dari Dinas Perhubungan Kota Medan dan 1 orang

perempuan dari masyarakat pengguna jalan. Dengan keterangan 1 orang dari Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Bapak Ihsan, 1 orang dari Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Bapak Fahrizki, dan 1 orang dari Karyawan Swasta yaitu Ibu Tika.

4.2.1. Adanya efektivitas program yang diatur.

Untuk mengetahui bagaimana program kerja dalam rangka pengawasan internal Dinas Perhubungan guna optimalisasi jaminan keselamatan penumpang angkutan umum di Kota Medan dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ihsan selaku petugas di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah dilakukan terkait dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai yaitu menerapkan program sistem pengawasan internal dan eksternal. Bahwasanya beliau mengatakan: “proses pencapaian visi misi sudah mulai terwujud, dimana salah satu tujuan dibentuknya visi dan misi perencanaan strategis adalah terciptanya kondisi lalu lintas yang lancar dan terkendali. Sehingga dengan adanya penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal tersebut mewujudkan tujuan dari visi dan misi dalam perencanaan strategis”..

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah tujuan penerapan strategi yang sudah dirancang oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan jaminan keselamatan penumpang

sudah sesuai dengan adanya dukungan penggunaan sistem pengawasan langsung untuk mengawasi lalu lintas. Dimana beliau mengatakan bahwa: “Penggunaan sistem ATCS merupakan salah satu alat yang mendukung agar terwujudnya tujuan perencanaan strategis yang telah dirancang untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dan jaminan keselamatan penumpang yang mana salah satu tujuannya adalah agar terciptanya kondisi lalu lintas yang lancar dan terkendali”.

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah dilakukan terkait dengan perencanaan yang matang dengan diterapkannya sistem ATCS untuk mengawasi lalu lintas di Kota Medan. Beliau mengatakan: “Sebelum diterapkannya ATCS di Kota Medan Dinas Perhubungan Kota Medan yang bekerjasama dengan beberapa pihak terkait telah melakukan perencanaan yang matang, agar penggunaan sistem ATCS dapat berjalan sesuai dengan tujuan”.

Kemudian penulis menanyakan kepada narasumber mengenai tindak lanjut dari perencanaan yang telah dirumuskan secara matang. Beliau mengatakan bahwa: “tindak lanjut yang dilakukan dengan adanya penerapan sistem ATCS ini adalah yang pertama memantau kondisi lalu lintas di persimpangan Kota Medan yang akan dipasang alat ATCS, kedua dengan melihat pelanggaran apa saja yang sering terjadi, sehingga ketika alat ATCS dipasang di beberapa titik persimpangan, pihak Dinas Perhubungan dapat dengan mudah mengatasi pelanggaran tersebut”.

Program sistem pelayanan angkutan kota yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan dengan Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2013 dan Permenhub Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dinas Perhubungan juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Standar Pelayanan Minimal angkutan tersebut kepada masyarakat melalui baliho, spanduk dan juga yang ditempelkan di pintu-pintu angkutan. Dinas Perhubungan juga menerima kritikan dan saran dari masyarakat terkait angkutan yang beroperasi dilapangan, dan kinerja pegawai Dinas Perhubungan.

Berkaitan dengan prosedur pelayanan angkutan kota yang optimal bagi masyarakat, pemerintah memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Peneliti melakukan observasi dilapangan menemukan bahwa Dinas Perhubungan menyediakan fasilitas untuk mendukung pelayanan angkutan kota seperti halte dan terminal untuk menunggu angkutan kota yang digunakan. Namun kenyataannya fasilitas yang disediakan tersebut belum digunakan masyarakat dengan semaksimal mungkin, bahkan beberapa terdapat disalahgunakan oleh masyarakat sendiri.

Sistem pelayanan angkutan kota juga mudah dimengerti oleh masyarakat karena memiliki nomor trayek yang sesuai dengan trayek masing masing sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Dinas Perhubungan selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

melalui pelayanan angkutan kota yang baik sesuai dengan visi dan misi. Dengan demikian jelas bahwa kepuasan masyarakat adalah tujuan utama Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan angkutan kota di Kota Medan. Namun peneliti menilai bahwa pada tahap ini strategi Dinas Perhubungan belum berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. Fasilitas penunjang pelayanan angkutan kota juga masih banyak yang disalah gunakan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4.2.2. Adanya pengawasan yang dilakukan.

Strategi pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan organisasi melalui penataan organisasi. Melalui strategi pengawasan diharapkan dapat menciptakan kemampuan dan kemandirian serta kepercayaan masyarakat terhadap kantor pemerintahan sebagai institusi pelayanan publik dan pegawai sebagai pelayan masyarakat. Strategi pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk organisasional, memberdayakan pegawai dan memberdayakan komunitas.

Dalam melakukan pengawasan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak lain seperti pihak penyedia angkutan atau perusahaan angkutan dan juga dengan Satuan Lalulintas dari Kepolisian. Pengawasan dilakukan oleh pegawai yang bekerja dilapangan untuk mengawasi angkutan yang sedang beroperasi agar tetap memberikan pelayanan sesuai

dengan standar yang ada. Kepala Seksi angkutan jalan mengatakan bahwa pengawasan juga dapat dilakukan apabila masyarakat juga memberikan aduan kepada pihak Dinas Perhubungan terkait pelayanan yang ada dilapangan.

Supir angkutan menyatakan bahwasanya mereka juga diawasi oleh pihak angkutan sebagai perusahaan yang memberikan jasa angkutan. Pegawai Dinas Perhubungan juga sering melakukan razia angkutan kota untuk memeriksa kelengkapan adminsitratif dan memeriksa kondisi angkutan yang digunakan. Salah satu contoh pengawasan adalah dengan memeriksa izin operasi kendaraan yang beroperasi melayani masyarakat sesuai dengan perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan dilapangan. (lihat transkrip wawancara dan dokumentasi).

Pengawasan dilakukan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan supir angkutan saat melayani masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi dan memeriksa kelengkapan pengendara yang berlalulintas sekaligus memeriksa kelengkapan angkutan yang sedang beroperasi. Dengan demikian peneliti menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah baik untuk meningkatkan

pelayanan angkutan kota kepada masyarakat. Sehingga dapat meminimalisir pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam bekerja untuk melayani masyarakat adalah dengan mengikuti arahan atau petunjuk dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Budaya angkutan kota di Kota Medan di mata masyarakat Kota Medan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti masih dikatakan buruk karena Supir angkutan masih sering melanggar aturan-aturan dalam berkendara seperti menerobos lampu merah, ugal-ugalan dan mengganggu arus lalulintas. Untuk mengubah budaya yang buruk di mata masyarakat Dinas Perhubungan menekankan kepada pihak angkutan kota dan supir angkutan kota untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan terus memberikan surat edaran terkait pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, di setiap peringatan hari besar seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Dinas Perhubungan juga memberikan surat edaran kepada angkuta kota untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penerapan pengawasan dan aturan untuk merubah budaya angkutan kota Dinas Perhubungan menekankan kepada pegawai dan pihak angkutan untuk melayani masyarakat sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan standar operasional. Pegawai Dinas Perhubungan juga dihimbau untuk

melayani masyarakat dengan ikhlas agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak angkutan dan supir angkutan terkait budaya pelayanan angkutan kota di Kota Medan menyatakan budaya angkutan kota dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal angkutan perkotaan. Supir angkutan mengatakan bahwa mereka dituntut untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar yang ada. Untuk mengubah citra buruk di mata masyarakat pihak angkutan kota juga memberikan arahan kepada masyarakat untuk naik dan turun di halte yang ada agar tidak mengganggu arus lalu lintas sehingga dapat mengurangi citra buruk di mata masyarakat pengguna jalan lainnya.

4.2.3. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Dalam menjalankan perannya, dinas perhubungan juga melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan kota Medan terhadap angkutan umum diatur lebih terperinci dalam peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019, angkutan umum disebut sebagai kendaraan umum, kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut orang dan/atau barang. Serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan.

Tanggung jawab sebagai pengawasan (controlling) dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan Controlling atau pengawasan merupakan salah satu tahapan penting

dari adanya suatu aturan, dengan adanya suatu pengawasan sehingga dapat mengukur sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan, dengan adanya peraturan yang mengatur, maka dinas perhubungan selaku Dinas yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap jalannya Angkutan Kota dan Dinas Perhubungan juga wajib mengawasi setiap ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap angkutan angkot yang berada di Kota Medan, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum dinas perhubungan kota medan mempunyai peran melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan perhubungan diantaranya adalah:

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan
- 2) Pengawasan terhadap izin trayek angkutan kota
- 3) Pengawasan terhadap kelayakan kendaraan angkutan kota
- 4) Pengawasan kesesuaian jalur angkutan kota
- 5) Pengawasan kesesuaian tariff
- 6) Penyidikan terhadap kelebihan muatan angkutan
- 7) Pengawasan perilaku sopir angkutan kota

Dalam melaksanakan kewajibannya Dinas Perhubungan telah memiliki program-program yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, yang umumnya dikenal dengan istilah steering control, setiap pengemudi Angkutan Kota wajib menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada di Kota Medan masih banyak ditemukan sopir Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran. Sopir

Angkutan Kota Medan tidak mengetahui tentang berbagai aturan yang wajib dijalankan serta aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh sopir Angkutan Kota di Kota Medan telah melakukan pemantauan Angkutan Kota yang dilaksanakan secara langsung kepada Angkutan Kota.

Tanggung jawab sebagai pembinaan dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh dinas perhubungan sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perhubungan, pembinaan tersebut meliputi kerja sama dan koordinasi antara dinas perhubungan dengan pihak pengelola angkutan kota maupun sopir angkutan kota, salah satu pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah memberikan pelatihan kepada para sopir angkutan kota cara berlalulintas yang baik dan benar, dan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT), pembinaan tersebut dilaksanakan dalam peningkatan keselamatan lalu lintas jalan khusus di bidang angkutan kota untuk menekan angka kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia (human error).

Pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang merupakan tanggung jawab dinas perhubungan kota medan. Pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Adapun tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Medan adalah :

- 1) Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya
- 2) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - a. Perda kota LLAJ
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
 - d. Perizinan angkutan umum
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
- 4) Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
- 5) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
- 6) Melakukan pengawasan, pengendalian, dan lalu lintas di rua-ruas persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
- 7) Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Didalam Dinas Perhubungan Kota Medan terdapat empat pembagian bidang, di antaranya yaitu :

- 1) Bidang Angkutan
- 2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Berdasarkan fenomena di atas jelaslah bahwa pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan di atas,

apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkrit dari aparaturnya untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik atau supir angkutan kota tersebut.

4.3. Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama beberapa narasumber/informan yang berada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan maka Penulis akan memberikan pembahasan pada berikut ini. Pada awal penelitian ini dilakukan penulis membaca kesimpulan dari sebuah penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan”**. dari hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya akan dibahas permasalahannya.

4.3.1. Adanya efektivitas program yang diatur.

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015: 24) menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Grindle (Mulyadi, 2015: 47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota

Medan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai untuk mengimplementasikan berbagai

Visi dari Dinas Perhubungan sendiri adalah terciptanya transportasi Kota Medan yang handal, nyaman dan manusiawi. Kemudian misi dari Dinas Perhubungan adalah meningkatkan sumber daya manusia, mewujudkan sistem angkutan massal yang terpadu, menyediakan aksesibilitas transportasi bagi seluruh golongan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi, serta mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah. Untuk mencapai visi dan misi tersebut Dinas Perhubungan berpegang kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 98 Tahun 2013 dan Nomor PM 29 Tahun 2015 yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memiliki visi dan misi yang menjadi acuan mereka dalam menjalankan dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik mengenai angkutan di Kota Medan. Selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan sudah sangat mendukung visi dan misi yang ada. Untuk itu, peneliti melihat bahwa pelayanan angkutan kota adalah prioritas Dinas Perhubungan. Namun strategi inti terkait visi dan misi dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota belum terlaksana dengan maksimal karena masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang memberikan pelayanan yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Sistem pelayanan angkutan kota yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan dengan Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2013 dan Permenhub Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dinas Perhubungan juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Standar Pelayanan Minimal angkutan tersebut kepada masyarakat melalui baliho, spanduk dan juga yang ditempelkan di pintu-pintu angkutan. Dinas Perhubungan juga menerima kritikan dan saran dari masyarakat terkait angkutan yang beroperasi dilapangan, dan kinerja pegawai Dinas Perhubungan.

Berkaitan dengan prosedur pelayanan angkutan kota yang optimal bagi masyarakat, pemerintah memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Peneliti melakukan observasi dilapangan menemukan bahwa Dinas Perhubungan menyediakan fasilitas untuk mendukung pelayanan angkutan kota seperti halte dan terminal untuk menunggu angkutan kota yang digunakan. Namun kenyataannya fasilitas yang disediakan tersebut belum digunakan masyarakat dengan semaksimal mungkin, bahkan beberapa terdapat disalahgunakan oleh masyarakat sendiri.

Paradigma *New Public Service* memberikan pandangan yang berkaitan dengan pelayanan yakni bahwa administrasi publik harus melayani warga masyarakat bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan publik dan melayani dari pada mengendalikan. Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal, menurut paradigmanew *public service* yaitu pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-

nilai publik yang ada. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengolaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas (Dwiyanto, 2009: 139).

Pandangan tersebut mengandung makna karakter dan nilai yang terkandung didalam pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Selain itu, pelayanan publik model baru ini harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan yaitu teori demokratis yang menjamin adanya persamaan warga negara tanpa membedakan asal- usul, kesukuan, ras, etnik, agama dan latar belakang kepartaian.

Banyak permasalahan pelayanan publik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dikalangan masyarakat, apalagi dibidang transportasi. Kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengangkutan sehingga para penumpang akan merasakan pelayanan transportasi umum yang disediakan pemerintah dengan baik. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membuat proses dan strategis bisnis transportasi umum berubah dengan cepat.

Menurut Masri (2003:1) transportasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan atau kegiatan masyarakat dan juga merupakan unsur terpenting dalam mobilitas manusia dan barang sehari – hari. Manusia

tidak akan mengalami perkembangan dan kemajuan apabila tidak ditunjang oleh transportasi. Transportasi yang baik haruslah merupakan suatu sistem yang dapat memberikan pelayanan yang cukup, baik kepada masyarakat secara umum maupun pribadi, yang cukup aman, nyaman, cepat dan dapat diandalkan oleh para penggunanya.

Berdasarkan pandangan dan pijakan teoritis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Adanya efektivitas program yang diatur Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan sudah berjalan dengan baik

4.3.2. Adanya pengawasan yang dilakukan.

Dalam melakukan pengawasan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak lain seperti pihak penyedia angkutan atau perusahaan angkutan dan juga dengan Satuan Lalulintas dari Kepolisian. Pengawasan dilakukan oleh pegawai yang bekerja dilapangan untuk mengawasi angkutan yang sedang beroperasi agar tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. Kepala Seksi angkutan jalan mengatakan bahwa pengawasan juga dapat dilakukan apabila masyarakat juga memberikan aduan kepada pihak Dinas Perhubungan terkait pelayanan yang ada dilapangan. (lihat transkrip wawancara dan dokumentasi)

Supir angkutan menyatakan bahwasanya mereka juga diawasi oleh pihak angkutan sebagai perusahaan yang memberikan jasa angkutan.

Pegawai Dinas Perhubungan juga sering melakukan razia angkutan kota untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memeriksa kondisi angkutan yang digunakan. Salah satu contoh pengawasan adalah dengan memeriksa izin operasi kendaraan yang beroperasi melayani masyarakat sesuai dengan perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan dilapangan. (lihat transkrip wawancara dan dokumentasi)

Pengawasan dilakukan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan supir angkutan saat melayani masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jumlah angkutan kota yang sangat banyak dan luasnya Kota Medan merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi dalam mengawasi angkutan kota. Namun Dinas Perhubungan masih dapat mengawasi angkutan kota secara berkala melalui pegawai yang ada dilapangan dan juga melalui uji kendaraan yang diuji secara berkala di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

4.3.3. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Purwanto (2012: 12), implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015: 12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Mulyadi (2015: 37) kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.

Menurut Mardiasmo (2016: 32), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran tujuan akhir kebijakan.

Menurut Mardiasmo (2016: 32) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran tujuan akhir kebijakan.

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebukan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa tujuan Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan sudah berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari proses Sistem manajemen keselamatan angkutan umum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa dokumen system keselamatan angkutan umum tersusun pada perusahaan angkutan umum dipenuhi berdasarkan pada lampiran peraturan Direktur Jendral Perhubungan.
2. Visi dari Dinas Perhubungan sendiri adalah terciptanya transportasi Kota Medan yang handal, nyaman dan manusiawi. Kemudian misi dari Dinas Perhubungan adalah meningkatkan sumber daya manusia, mewujudkan sistem angkutan massal yang terpadu, menyediakan aksesibilitas transportasi bagi seluruh golongan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi, serta mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah.
3. Strategi Dinas Perhubungan Kota Medan mencapai visi dan misi dengan menyelenggarakan pelayanan angkutan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 mengenai Standar Pelayanan Minimal.

4. Dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak penyedia jasa angkutan untuk menerapkan Standar Pelayanan Angkutan pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5.2. Saran

Peneliti hanya dapat memberikan saran yang mudah-mudahan memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan.

1. Perlu meningkatkan strategi yang sudah jelas menjadi lebih jelas agar dapat meningkatkan pelayanan angkutan kota yang lebih baik lagi.
2. Keterlibatan pihak lain perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan angkutan kota.
3. Menambah sarana dan prasarana penunjang pelayanan angkutan kota.
4. Meningkatkan pengawasan angkutan kota agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi citra buruk angkutan kota.
5. Lebih sering memberikan pelatihan kepada pegawai dan supir angkutan kota agar memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal angkutan kota.
6. Pihak Dinas Perhubungan juga disarankan agar menempatkan pengawasan dengan lapangan khususnya di jalan raya di seluruh persimpangan Kota Medan, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat

diminimalisir sekaligus memberi jaminan kenyamanan dan keselamatan pengguna angkutan umum.

7. Disamping hal tersebut diperlukan juga sosialisasi tentang pentingnya jaminan keselamatan pengguna angkutan umum terutama bagi pelaksana jasa kendaraan umum dan pihak yang terkait untuk memastikan bahwa kelayakan kendaraan tetap menjadi prioritas dalam pelayanan umum.
8. Saran dari peneliti tersebut tidak untuk mengkritik Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pelayanan angkutan kota kepada masyarakat. saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah masukan dan ditanggapi positif untuk meningkatkan Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Agus Dwiyanto, 2009, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Anonim, 2009. Undang-Undang No.22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.\
- Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Liberty
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M dan Donnelly, J.Jr, 1984. “Organisasi dan Manajemen”: Perilaku, Struktur dan Proses. Edisi Keempat.Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo (2018). Perpajakan, Edisi terbaru 2018- penerbit Andi
- J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Nasution, M. N. 2004. Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Niswonger et.al., 1999, diindonesiakan oleh Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, Prinsip-prinsip Akuntansi, edisi 19, jilid 1: penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sedarmayanti.2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju
- Simbolon, M. M. (2003). Ekonomi Transportasi. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang P. 2003. Teori & praktek kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama

- Supriyono, R.A. 2000. Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan. Edisi Kedua. Buku Kedua. BPFE: Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2001. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES
- Suryani, Evi. 2016. “Efektivitas Pemungutan PBB Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Purwanto. (2012). Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB). Jakarta : Sekretariat Negara.
- Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan
- Tahir, Arifin, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung: CV Alvabeta.
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta
- W.J.S.Poerwadarminta, 2009. Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kepten Muchtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 22 Desember 2021

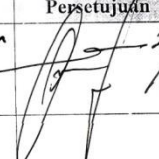
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ADRYAN PRATAMA MST
N P M : 17.031000.69
Jurusan : Administrasi Publik
Tabungan sks : 14.2 sks, IP Kumulatif 2.63

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi : Internal

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan dalam rangka optimalisasi jaminan keselamatan Penumpang dalam angkutan umum di Kota Medan	 28/12/2021
2	Efek adanya penilaian kinerja Terhadap Produktivitas kerja pegawai (studi kasus) Badan Kepegawaian daerah kabupaten Deli Serdang	
3	Analisis Tingkat Efektivitas Kerja karyawan di Di PT Pegadaian	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Ueng/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl.20....


Ketua,
(ANANDA MAHARDIKA S.S.M, SP)

020

PB: ADRYAN


(.....)
ADRYAN PRATAMA MST

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2016

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 - Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING Nomor : 340/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **22 Desember 2021**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ADRYAN PRATAMA NST**
N P M : 1703100069
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.**

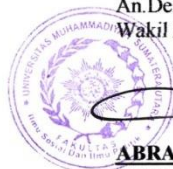
Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 020.17.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 22 Desember 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 05 Syaban 1443 H
08 Maret 2022 M

An.Dekan,
Wakil Dekan - I



ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN : 01 11 117804



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 9 Maret 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ADRYAN PRATAMA NST
N P M : 17.03.1000.62
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 340/SK/II.3/UMSU-03/F/20.22 tanggal 9 Maret dengan judul sebagai berikut :

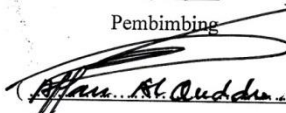
Efektivitas Pengawasan Internal Dinas perhubungan
dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan
Penumpang dalam Angkutan Umum Di Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

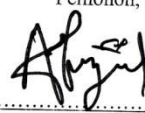
1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing


Alfan R. Qudus S. M.Si

Pemohon,


(.....)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI


Nomor : 367/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	ANNISA AGNES	1803100022	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGUPAHAN PEGAWAI DI PT. PELNI CABANG BATAM
17	ADRYAN PRATAMA NST	1703100069	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN
18	SHANDY HASYIM	1803100074	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MEDAN
19	RIANDY PUTRA	1803100077	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LABUHAN BATU NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG ANTISIPASI DINI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN LABUHAN BATU
20	RIRI FEBRIANA	1803100062	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO.9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MEDAN

Medan, 12 Syaban 1443 H

15 Maret 2022 M


Dik, (Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



UMSU
Unswati Cerdas Terpercaya
Berikanlah setiap surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ADRYAN PRATAMA NASUTION
NPM : 1703100069
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PERHUBUNGAN
DALAM RANGKA OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG
DI KOTA MEDAN.

No.	Tanggal	Isi	Paraf Pembimbing
1	30/12/2021	Bimbingan dan latar belakang proposal	f
2	07/02/2022	Bimbingan BAB 1 dan uraian Teoritis	f
3	02/03/2022	Acc proposal SKRIPSI	f
4	18/03/2022	Bimbingan revisi Latar belakang	f
5	21/03/2022	- Bimbingan Draf wawancara - Bimbingan BAB 4 mengenai Pembahasan	f
6	20/05/22	- Bimbingan Pembahasan & bimbingan BAB 5 - Kesimpulan & saran skripsi	f
7	27/8/22	perbaiki penulisan sesuai buku petunjuk	f
8	31/8/22	Acc. diundang Meja Bimbingan	f

Medan,20.....

Dekan,

(Dr. Ar. Pin. Saleh S. Sos.) MSP

Ketua Jurusan,

(Arunda M. Manurung) MSP

Pembimbing,

A. Cahya S. S. MSP



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 -Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 433/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 18 Syaban 1443 H
21 Maret 2022 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **ADRYAN PRATAMA NST**
N P M : 1703100069
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/559/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 433/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022. Tanggal: 21 Maret 2022. Hal : Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Adryan Pratama Nst.**
NPM : 1703100069.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul Skripsi : "Efektivitas Pengawasan Internal Dinas Perhubungan Dalam Rangka Optimalisasi Jaminan Keselamatan Penumpang Dalam Angkutan Umum Di Kota Medan".
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 23 Maret 2022



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 09059/LAP/PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

🌐 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📍 [perpustakaan_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 670/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Adryan Pratama
NPM : 1703100069
Fakultas : FISIP
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Syawal 1443 H.
21 Mei 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1321/UND/II.3.AU/UMSU-03/E/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Rabu, 07 September 2022

Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Fokoh Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RAHMAT FAUZAN	2103100078P	NALLI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MEDAN
2	ADRYAN PRATAMA NST	1703100069	NALLI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	EFEKTIVITAS PENGAJARAN INTERNAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN
3	SHINTIA ENDAH PRATIWI	1803100063	IDA MARTINELLI, SH, MM	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANG SIANTAR
4	DIAN KUSUMA WARDANI	1803100029	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS MANAJEMEN OPERASIONAL PIMPINAN DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN DI KANTOR BPBD SUMATERA UTARA
5	ANNISA AGNES	1803100022	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	NALLI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	STRATEGI PENGAJARAN INTERNAL DALAM PENGUPAHAN PEGAWAI DI PT. PELNI CABANG BATAM

Menulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Ketua,

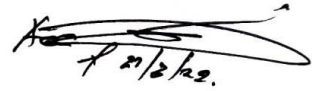
Sekretaris

Paritia Ujian



03 September 2022 M

Medan, 06 Sntar 1444 H



Handwritten signature and date: 21/2/22.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

NAMA :

NPM :

JUDUL :

A. Adanya Efektivitas program yang di atur

1. Menurut Bapak /Ibu bagaimana Efektivitas petugas dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan angkutan umum di kota Medan?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara dinas perhubungan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif di kota Medan ?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah pengawasan dinas perhubungan dalam mengawasi angkutan umum di kota Medan sudah efektif bagi masyarakat?

B. Adanya Pengawasan yang dilakukan

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana ketepatan waktu pengawasan petugas dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan Angkutan umum pengawasan?
2. Menurut Bapak/Ibu Apa saja kendala dalam melaksanakan pengawasan Angkutan Umum?
3. Menurut Bapak/Ibu Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan angkutan umum di kota Medan?

C. Adanya Tujuan yang ingin di capai

1. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan pengawasan dinas perhubungan dalam mengawasi angkutan umum di kota Medan?
2. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala dinas perhubungan dalam mengawasi angkutan umum di kota Medan dalam mencapai tujuan?
3. Menurut Bapak/Ibu apa saja faktor yang mempengaruhi dinas perhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam mengawasi angkutan umum di kota Medan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adryan Pratama Nst
Tempat/ Tanggal Lahir : Benteng Huraba, 28 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama/Bangsa : Islam/ Indonesia
Alamat : Tahalak Ujung Gading
Anak Ke : 1 (Pertama) dari 4 (Empat) bersadudara
Nama Orang Tua
Ayah : Ichsan Nasution
Ibu : Regina Masli
Alamat Orang Tua : Tahalak Ujung Gading

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SDN 101100 Tahalak
2. Tamat dari SMP Negeri 1 Sigalangan Tahun 2014, Berijazah
3. Tamat dari SMA Negeri 2 Padang Sidempuan Tahun 2017, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammaidyah Sumatera Utara 2017 Sampai Sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Adryan Pratama Nst